

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang melindungi setiap hak- hak manusia tanpa membedakan laki- laki maupun perempuan, yang membedakan adalah tingkat ketakwaan manusia itu sendiri. Diantara hak- hak manusia itu adalah hak untuk memperoleh pekerjaan sebab dalam islam tidak ada perbedaan antara laki- laki dan perempuan untuk memperoleh pekerjaan. Islam bahkan menganjurkan manusia bekerja untuk menjadikan kesejahteraan dan ketentraman keluarga. Islam mempunyai posisi yang unik karena mengakui status ekonomi perempuan yang independent dan memberikan hak untuk memiliki, menggunakan dan menikmatinya tanpa perantara atau wali.

Dalam Al- qur'an telah jelas terungkap bahwa kedudukan dan kemuliaan seseorang baik laki- laki maupun perempuan dinilai bukan dari kekuatan maupun kepintarannya tetapi lebih karena ketakwaannya kepada allah SWT. Hal ini diperkuat oleh firman Allah QS. Al- Hujurat:13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ خَلْقَكُمْ مِنْدَكَّرٍ وَأَنْتَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ

عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَكُمُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”

Dari ayat diatas sudah jelas bahwa Islam itu menghargai harkat dan martabat, derajat dan hak setiap perempuan tanpa membedakan dengan laki- laki. Perempuan bebas untuk mengembangkan ekonominya dan tidak lagi termarginalkan, termasuk dalam perempuan yang terjun dalam dunia politik.

Politik pada hakikatnya adalah kekuasaan (*Power*) dan pengambilan keputusan yang lingkupnya dimulai dari institusi keluarga hingga institusi politik formal. Oleh karena itu pengertian politik pada dasarnya meliputi masalah-masalah dalam kehidupan sehari- hari yang melibatkan perempuan. Keterlibatan perempuan dalam politik bukan bertujuan untuk menjatuhkan, menurunkan atau bahkan merebut kekuasaan dari tangan laki- laki melainkan dimaksudkan agar bisa menjadi mitra sejajar laki- laki. Tuhan saja sengaja menciptakan laki- laki dan perempuan secara berbeda dan dengan perbedaan ini keduanya bisa saling mengisi dan saling melengkapi satu sama lain untuk selanjutnya bekerja sama membangun kekuatan sinergis. Kemitraan yang demikian hanya mungkin terwujud manakala laki- laki dan perempuan sudah berada dalam posisi dan kedudukan yang sama dan sederajat sehingga tidak ada lagi diskriminasi, dominasi dan eksploitasi. Kondisi itulah yang disebut dengan keadilan dan kesetaraan gender.¹

Selama ini, politik dan perilaku politik dipandang sebagai aktivitas maskulin. Perilaku politik yang dimaksudkan disini mencakup kemandirian, kebebasan berpendapat dan tindakan agresif. Ketiga karakteristik tersebut tidak pernah dianggap ideal dalam diri perempuan karena itu masyarakat selalu

¹Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaruan Keagamaan*, (Bandung: Mizan Pustaka,2005), 255.

memandang perempuan yang mandiri, berani mengemukakan pendapat dan agresif sebagai orang yang tidak dapat diterima atau diinginkan. Dengan kata lain perempuan yang demikian bukan termasuk tipe perempuan yang ideal.²

Pandangan miring terhadap perempuan tersebut sudah cukup lama terjadi. Dalam buku *The Status of Women in Mahabarata*, Prof. Indra menulis: tidak ada makhluk yang lebih berdosa daripada perempuan. Perempuan itu menyalakan api. Dia adalah sisi pisau yang tajam. Efek dari pandangan diskriminatif mengakibatkan kekhawatiran terhadap perempuan. Tidak sedikit orang yang meyakini bahwa perempuan adalah sumber malapetaka, kerusakan suatu bangsa, dan pangkal kemerosotan moral. Mengikuti logika di atas, maka perempuan dilarang menjadi pemimpin. Alih-alih menjadi pemimpin, kehadirannya pun membawa malapetaka.³

Dalam Undang- Undang Nomor.10 tahun 2008 tentang pemilu legislatif dan Undang- Undang Nomor.2 tahun 2008 tentang partai politik bahwasanya kuota keterlibatan perempuan dalam dunia politik adalah sebesar 30 %, terutama untuk duduk di parlemen. Bahkan dalam pasal 8 Undang- Undang Nomor.10 tahun 2008, disebutkan adanya pernyataan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan parpol tingkat pusat sebagai salah satu persyaratan parpol untuk dapat menjadi peserta pemilu, dan pasal 53 Undang- Undang menyatakan bahwa daftar bakal calon peserta pemilu juga harus memuat sedikitnya 30% keterwakilan perempuan. Dalam hal kuota tersebut, sebagian

²M. Qutub, *Islam The Misunderstood Religion*, Ter. Fungky Kusnaedi Timur, *Islam Agama Pembebas*, 212-21.

³Ibid., 215.

perempuan memang merasa bahwa mereka juga sudah di beri kesempatan untuk berpolitik, tapi sebagian perempuan pada umumnya selalu bertanya-tanya, mengapa harus ada persentase yang dijadikan eksistensi perempuan? yang berarti ini termasuk ketimpangan dan juga ketidakadilan perempuan dalam porsi dipilih dan memilih. Hak mereka didiskriminasi, seperti di bedakan dan pasti ujung-ujungnya subordinasi yang terjadi, yaitu sebuah posisi atau peran yang merendahkan nilai peran yang lain dan menomorduakan perempuan untuk turut andil dalam politik. Perempuan umumnya hanya dianggap sebagai pelengkap, sehingga kehadirannya sama sekali tidak di perhitungkan.⁴

Kajian tentang perempuan dan gender terus menemukan momentumnya, perhatiannya hampir tak pernah diberikan kepada ulama' perempuan. Padahal terdapat cukup banyak ulama' perempuan dan sekaligus para perempuan yang memiliki peran penting dalam keilmuan Islam. Demikian juga terdapat perempuan-perempuan yang memiliki peran krusial dalam pembentukan lembaga-lembaga pendidikan islam seperti madrasah dan lain-lain. Meski demikian, masih banyak yang harus dilakukan untuk mengungkapkan sejarah keulama'an dan keilmuan dikalangan perempuan muslim, tidak hanya ditimur tengah dan kawasan muslim lain, tetapi juga di Indonesia. Sebab seperti disimpulkan baik setelah mengkaji kehidupan keagamaan perempuan muslim bahwa posisi perempuan dalam masyarakat muslim termasuk di indonesia tidak bisa difahami tanpa apresiasi menyeluruh tentang konteks dimana mereka hidup, berbagai faktor budaya, politik, ekonomi, sosial bahkan agama saling

⁴Marzali, *Kedudukan Perempuan Dalam Politik*, (Jakarta, Ghalia Putera,2007),97-98.

mempengaruhi dalam menentukan posisi perempuan tidak terkecuali ulama perempuan.⁵

Di lingkungan masyarakat muslim Indonesia, seseorang baru dianggap sebagai ulama' jika telah diakui oleh komunitasnya sendiri sebagai ulama'. Pengakuan itu datang bukan semata- mata mempertimbangkan keahlian dalam ilmu agama, tetapi juga integritas moral dan akhlaqnya dilengkapi dengan kedekatan dengan ummat. Kedekatan dengan ummat dilapiskan bawah bisa disimbolkan dengan kepemilikan dan pengasuhnya terhadap pesantren atau madrasah.

Sejarah kenabian mencatat sejumlah besar perempuan yang ikut memainkan peran-peran bersama laki- laki termasuk Khadijah dan Aisyah adalah perempuan- perempuan cerdas dan terkemuka. Mereka sering terlibat dalam diskusi- diskusi tentang tema- tema sosial politik bahkan mengkritik kebijakan- kebijakan domestik maupun publik yang patriarkis. Partisipasi perempuan juga muncul dalam sejumlah baiat untuk kesetiaan dan loyalitas kepada pemerintah. Sayangnya dalam perjalanan sejarah politik kaum muslimin partisipasi politik perempuan mengalami proses degradasi dan reduksi secara besar- besaran. Ruang aktivitas perempuan dibatasi hanya pada wilayah domestik dan diposisikan secara subordinat. Pembatasan- pembatasan tersebut bukan hanya terbatas dalam buku- buku pelajaran,tetapi juga muncul dalam realitas sosial. Sejarah politik Islam mencatat bahwa sejak wafatnya Nabi Muhammad dan masa Khulafaur

⁵Mansour Faqieh, *Analisis Gender dan transformasi Sosial*, 148.

Rasydin sampai awal abad ke XX tidak banyak menampilkan tokoh perempuan untuk peran publik.⁶

Diktum- diktum Islam telah memberikan ruang pilihan bagi perempuan juga laki- laki dalam menjalani peran- peran politik domestik maupun publik, untuk menjadi cerdas dan terampil. Karenanya saat ini banyak perempuan yang dihadapkan pada perseptif modernitas yang semakin terbuka lebar. Persepsi tendensius bahwa kaum perempuan kurang rasional, lebih emosional dan kurang kompeten menagani urusan domestik dan publik dibanding kaum laki- laki kini telah gugur dan tidak lagi populer. Kaum perempuan saatnya kini bergerak merengkuh masa depannya dan mengubur masa lalu yang suram penuh nestapa dan menunjukkan bahwa dunia politik perempuan wajib diacungi jempol dari pada hanya sekedar *Macak- Manak dan Masak*.⁷

Fenomena partisipasi politik perempuan yang saat ini mayoritas berlatar belakang pesantren menunjukkan bahwa secara kultural, posisi politik perempuan menunjukkan perkembangannya secara signifikan. Perempuan pesantren ternyata mampu berkecimpung dalam dunia politik dan ini sebuah prestasi yang pantas diacungi jempol sehingganya hal ini menjadi fenomena yang menarik, karena perempuan yang notabennya hanya sebagai pemangku jabatan didunia domestik, apalagi dari perangkat pimpinan pesantren putri Salafiyah ShafīyahSukorejo disinyalir juga ikut aktif dalam dunia perpolitikan. Keaktifan atau partisipasi politik perempuan pesantren di Salafiyah ShafīyahSukorejo terlihat dari aktivitas

⁶Muhammad Haitsam Al- Khayyathi, *Problematika Muslimah Di Era Modern*, (Jakarta, Gelora Aksara Pratama, 2007), 23.

⁷Mufidah, *Gender dipesantren Slaf, Why Not?*, (Malang, UIN Maliki Press, 2010), 145.

politik dan peran politiknya dalam proses pesta demokrasi sekaligus selalu memberikan penyadaran kepada kaum perempuan dilingkungan pondok pesantren untuk tetap memberikan sumbangan hak suara dan aspirasinya bahwa saat ini peran mereka layak untuk diakui. Karena hak suara perempuan memiliki kesejajaran dengan laki- laki dalam hal mengambil dan menentukan keputusan. Begitupula apabila perempuan terlibat dalam pemilihan umum untuk memilih salah satu partai politik yang menjadi pilihannya apalagi ia duduk sebagai pengurus di salah satu partai politik lebih- lebih terpilih sebagai anggota dewan.⁸

Terpilihnya perempuan dari kalangan pondok pesantren yang menduduki jabatan di suatu instansi merupakan suatu fenomena yang pantas diapresiasi hal ini karena memberikan nilai plus bagi masyarakat Situbondo umumnya dan masyarakat sekitar pondok pesantren khususnya karena telah memberikan ruang gerak terhadap aktivitas politik perempuan. Karena jika dilihat prosentase keterwakilan perempuan dianggota dewan, terutama di Jawa Timur sudah memberikan gambaran keterbukaan terhadap hak perempuan yang sudah mulai diterima dikalangan masyarakat. Karena tidak bisa dipungkiri ketertarikan perempuan dari kalangan pesantren terhadap dunia politik sudah mulai nampak dipermukaan. Fenomena partisipasi politik perempuan dari kalangan pesantren terbesar disitubondo initelah memberikan daya tarik tersendiri bagi semua pihak utamanya terhadap pilihan politik para masyarakat, alumni dan santri atau santriwati untuk tetap memberikan sumbangsuhnya terhadap kemajuan sebuah negara.

⁸Uswatun Hasanah, *Wawancara*, Sumberejo, 06 juni 2016.

Lain dari hal itu, secara sederhana ada perubahan dalam proses politik yang terjadi di pondok Pesantren Salafiyah Shafiyah Sukorejo Situbondo, baik itu sebelum atau bahkan sesudah pemilihan umum. Perubahan tersebut terlihat nampak jelas dari bergesernya para elite politik dari partai PPP ke partai PKB, sehingganya secara kultural emosional kebebasan perempuan sebagai salah satu mahluk Tuhan juga diberikan ruang.⁹

Secara sosiologis, Pondok Pesantren Putri Salafiyah Shafiyah Sukorejo merupakan salah satu pondok pesantren yang berada dalam lingkup pondok pesantren terbesar dikabupaten Situbondo. Secara sosio historis pondok Salafiyah Shafiyah Sukorejo ini berupa hutan belantara namun atas saran Habib Musawa dan Kiai Asadullah dari Semarang, tepat pada tahun 1908 K.H. R Asyad Syamsul Arifin memabat hutan lebat tersebut untuk kemudian dijadikan sebuah pesantren. Dipilihnya hutan tersebut bukan serta merta karena kehendak K.H. R Asy'ad akan tetapi hasil dari Istikhoroh. Pondok Pesantren Salafiyah Shafiyahputri Sukorejo berlokasi di desa Sumberejo kecamatan Banyuputih kabupaten Situbondo. Pondok ini menempati area seluas 11,9 ha dengan ciri kekhasannya yaitu memadukan antara sistem salaf dan sistem modern. Jika ditelisik secara rasional, ternyata Pesantren yang notabennya lembaga keagamaan tertua di Indonesia yang juga mengajarkan doktrin keagamaan mempunyai peran besar dalam sosialisasi gender menuju sikap yang egaliter salah satunya bisa dimulai dari pesantren. Sebagaimana diketahui bahwa mayoritas dipondok pesantren Sukorejo ini kultur Nahdliyin sangat mendominasi dan arena Pondok Pesantren Salafiyah

⁹Nyai Zainiyah, *Wawancara*, Sumberejo, 28 September 2016.

ShafīyahSukorejo menjadi magnet tersendiri bagi para perangkat pesantren maupun masyarakat sekitar pesantren.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, maka peneliti mengambil subyek kepada para perempuan pesantren yang juga ikut andil dalam proses pesta demokrasi khususnya perempuan Pesantren Putri Salafiyah Shafīyahdi Sukorejo. Hal ini akan menjadi menarik untuk diteliti secara mendalam karena dalam pengamatan awal peneliti, ditemukan fenomena unik yang menggelitik pandangan. Fenomena tersebut adalah ketertarikan perempuan dari kalangan pesantren kepada dunia politik yang selama ini dianggap sebagai aktivitas yang banyak digandrungi oleh para laki- laki ketimbang perempuan apalagi perempuan pesantren. Selain sebagai tempat mencari ilmu dan tempat segala kebutuhan rohani, pesantren yang notabennya kental dengan hal keagamaan, di pondok Pesantren Putri Salafiyah ShafīyahSukorejo para perangkat pesantrennya juga memberikan penyadaran politik kepada santriwati dan kepada masyarakat sekitar pesantren untuk selalu mengikuti atau ikut andil dalam pesta demokrasi. Karena disadari atau tidak saat ini keterlibatan politik khususnya politik perempuan hanya diakui sebanyak 30%, dari kuota tersebut masih banyak hambatan yang sering terjadi. Lain dari hal itu, ternyata ketertarikan para kader perempuan di pondok Pesantren Salafiyah ShafīyahSukorejo terhadap dunia politik itu juga di latar belakang oleh keberadaan para elite politik yang menjadi patron dalam perkembangan politik di kabupaten Situbondo. Selain itu para aktivis politik perempuan dilingkungan pondok pesantren, selalu memanfaatkan waktu untuk memberikan bentuk sosialisasi politik baik berupa seminar formal maupun

informal (diskusi, workshop yang dibungkus dengan pengajian dan temu alumni para masyarakat dilingkungan pondok pesantren baik perempuan maupun laki-laki, serta santriwan dan santriwati) untuk membuktikan kepada para perempuan bahwa saat ini politik merupakan suatu aktivitas yang boleh dilakukan oleh siapa saja dan tidak hanya merupakan aktivitas yang banyak dilakukan oleh para laki-laki saja.

Dengan melihat hal yang demikian, Dalam tulisan ini, penulis mencoba meneliti lebih mendalam lagi tentang fenomena politik perempuan yang saat ini banyak para perangkat pesantren yang juga aktif dalam dunia perpolitikan yang secara kultural emosional lebih dekat dengan organisasi NU, yang dianggap mampu dan mumpuni dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjadi pemimpin yang lebih baik. Sebab baik sebelum atau sesudah pemilu partisipasi politik perempuan baik dari kalangan pesantren dan non pesantren menjadi sangat signifikan dalam kancah politik saat ini. sehingga peneliti dapat merumuskan masalah tersebut dengan judul “Fenomena Perempuan Pesantren Putri Salafiyah Shafiyah Sukorejo Dalam Sosialisasi Politik Pada Pilkada Kabupaten Situbondo Tahun 2015” yang memfokuskan penelitian pada keterlibatan para perempuan pesantren Salafiyah Shafiyah Sukorejo baik instansi politik praktis maupun keterlibatannya dalam pesta demokrasi di kabupaten Situbondo khususnya pada pemilihan Bupati Situbondo tahun 2015.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang diatas maka, kami buat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dinamika aktor politik perempuan pondok pesantren Salafiyah Shafiyah Sukorejo dalam Pemilihan Kepala daerah Kabupaten Situbondo tahun 2015?
2. Bagaimana para aktor perempuan di Pondok Pesantren Putri Salafiyah Shafiyah Sukorejo dalam mensosialisasikan Pemilihan Kepala daerah Kabupaten Situbondo tahun 2015?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan rumusan masalah di atas, maka peneliti mempunyai tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini. Adapun tujuan dari penelitian ini agar memperoleh gambaran yang jelas dan tepat serta terhindar dari adanya interpretasi dan meluasya masalah dalam memahami isi penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Memahami dan Mengetahui dinamikaaktor politik perempuan pesantren puteri Salafiyah Shafiyahkhususnya dalam Pemilihan Kepala daerah KabupatenSitubondo tahun 2015.
- b. Memahami dan Mengetahui para aktor perempuan pesantren putri Salafiyah Shafiyahdalam mensosialisasikan Pemilihan Kepala daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2015.

perasaannya. Dan paling banyak tidak diakui atau sering termarginalkan jika berada pada posisi yang lebih strategis.

3. Pesantren Puteri

Merupakan lembaga pengajian Islam yang paling tua berdiri yang didalamnya diajarkan pentingnya moral keagamaan yang dijadikan sebagai pedoman hidup dalam masyarakat. jadi secara sederhana pesantren putri adalah lembaga pengajian keagamaan yang didalamnya dihuni oleh para santriwati.

4. Sosialisasi Politik

Proses dimana individu atau kelompok dapat mengetahui pengetahuan politik dari lingkungan yang di peroleh ataupun dari luar lingkungannya.

5. Pemilihan Kepala Daerah

Merupakan pemilihan yang dilakukan secara langsung yang bertujuan memilih salah satu pemimpin disuatu daerah berdasarkan asas demokrasi.

Jadi, Fenomena Perempuan Pesantren Putri Salafiyah Shafiyah Sukorejo dalam Sosialisasi Politik pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Situbondo dapat diartikan sebagai salah satu peristiwa yang terjadi dikarenakan ada aktor politik Perempuan yang memiliki kekuasaan dalam lingkup dunia pesantren selain sebagai figur seorang yang dipandang sebagai orang yang mengajarkan ajaran keislaman ternyata juga ikut memberikan pengetahuan politik yang dimulai dari lingkungan pondok sendiri hingga diluar lingkungan pondok pada Pemilihan Kepala Daerah Situbondo tahun 2015 sehingga sesuai dengan asas demokrasi yang sudah ada.

F. Penelitian Terdahulu

Masalah perempuan dan politik sebenarnya sudah banyak yang meneliti, namun fenomena tentang fenomena politik perempuan pesantren hanya beberapa orang saja yang meneliti. Hal ini sebenarnya menarik untuk diteliti karena saat ini banyak para perangkat pesantren yang juga ikut andil dalam dunia perpolitikan.

Ada beberapa penelitian- penelitian terdahulu yang mengkaji tentang politik perempuan pesantren antara lain:

1. Dalam Desertasi Abdullah Hubed (2009). yang berjudul :Peran Politik Perempuan Pesantren Ihya' Ulumudin Gresik. Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa faktor perempuan pesantren ikut dalam dunia politik adalah ingin ikut andil dalam melakukan pembangunan khususnya di daerah. Dalam dunia politik perempuan Ihya' Ulumudin bahwa dunia politik merupakan dunia perjuangan dalam menyiarkan dakwah Islamiyah. Keterlibatan perempuan pesantren Ihya' Ulumudin dalam dunia politik bukan hanya sekedar dalam dunia politik yang pasif tetapi juga aktif baik dalam mendukung salah satu partai maupun penguasa tertentu dalam mendelegasikan salah satu pengurus pondok pesantren ihya' Ulumudin untuk menjadi calon dalam menduduki jabatan tertentu.
2. Buku yang ditulis oleh Amatullah Shafiyah (2002) yang berjudul: Kiprah Politik Muslimah konsep dan Implementasinya. Yang didalam buku ini menjelaskan tindakan politik atau samadengan istilah partisipasi politik, bagi kaum muslimah terasa begitu jauh, politik

abad- abad terakhir telah menjadi ruang yang gelap dan tabuh bagi muslimah. Para muslimah dan juga kaumperempuan pada umumnya. Pada saat ini, para muslimah dalam dimensi ruang dan waktu yang berbeda disadari atau tidak telah melakukan aktivitas politik. Contoh partisipasi politik yang paling sederhana dan hampir dilaksanakan semua orang adalah ikut dalam pemilihan umum.

3. Skripsi Nur Laili Rohmah fakultas Ushuluddin jurusan Aqidah Filsafat tahun 2004. Tentang peranan perempuan dalam politik menurut pandangan Islam. Dimana isi skripsi tersebut menjelaskan bahwa dalam pandangan Islam tidak ada perbedaan yang mencolok antara kedudukan laki- laki dan perempuan. Walaupun ada hanya sebatas sebagai Amar Ma'ruf nahi Mungkar.

Dalam penelitian terdahulu yang ditemukan baik dari disertasi, jurnal dan buku baru ada satu tulisan yang memunculkan adanya Fenomena Perempuan PesantrenPesantren Putri Salafiyah Shafiyah Sukorejo dalam Sosialisasi Politik pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2015. Dalam penelitian yang pertama fokus kajiannya pada perempuan disalah satu pesantren di Gresik yang notabnya juga menyadari akan pentingnya politik dan pembangunan desa dalam suatu negara sehingga para perempuan di Gresik juga ikut andil dalam pemilihan Legislatif tahun 2004. Sedangkan fokus penelitian yang kami tulis adalah sama- sama-sama meneliti aktor perempuan dari kalangan pesantren hanya saja perannya bukan Cuma pengasuh tapi juga aktif didunia

politik praktis, selain itu kami juga menjelaskan dinamika politik yang terjadi dalam pemilihan umum bupati bukan pada pemilihan umum legislatif.

Dalam penelitian yang kedua fokus kajiannya hanya pada peran politik perempuan dalam pandangan Islam. Sedangkan fokus penelitian kami adalah selain meneliti peran politik perempuan dalam pandangan Islam juga fokus pada fenomena yang sering terjadi disekitar kita yang oleh sebagian orang dianggap tabu tapi banyak dilakukan oleh mereka para aktor politik perempuan dari kalangan pesantren khususnya di Pondok Pesantren Putri Salafiyah Shafiyah Sukorejo dimana selain ikut berpartisipasi dalam dunia politik, mereka juga memberikan penyadaran politik dalam setiap pesta demokrasi. Selain itu kami juga memfokuskan pada bagaimana politik memberikan ruang gerak pada perempuan dan bagaimana pula teori gender dan politik memaknainya.

Penelitian ini menjadi menarik selain karena sedikit sekali orang yang meneliti akan masalah perempuan dan politik hal ini juga karena ketertarikan perempuan dalam dunia politik saat ini meskipun masih mencapai 30% tapi tetap wajib diacungi jempol. Pasalnya, sebagai bagian dari penduduk dimuka bumi ini keterwakilan perempuan dalam dunia politik saat ini juga ingin diakui bukan hanya ingin termarginalkan saja apalagi hanya sebagai pemangku jabatan domestik. Fenomena yang kami teliti ini merupakan gebrakan awal bagi para perempuan khususnya perempuan dari kalangan pesantren yang saat ini sudah mulai banyak menduduki jabatan publik karena mereka menyadari pentingnya keterwakilan mereka bagi kemajuan suatu negara. Selain itu, di Pondok Pesantren Salafiyah Shafiyah inilah para perempuan selalu memberikan penyadarn kepada

seluruh masyarakat sekitar lingkungan pondok, ataupun kepada santriwan atau santriwatinya.

